

Modernisasi Sekuler dan Krisis Identitas sebagai Akar Revolusi Iran 1979

Fatimah Hs¹, Muhammad Yunus², Muhammad Jusman Rivay Rumra³, A. Nurfadhil⁴, Hasaruddin⁵,
Rahmawati⁶

^{1,2,3,4,5,6}UIN Alauddin Makassar

ftkuinam.imah@gmail.com

Abstract

The 1979 Iranian Revolution stands as a pivotal event in modern Islamic history, driven not only by political and economic factors but also by an identity crisis resulting from the Pahlavi Dynasty's secular modernization project. This study aims to analyze the relationship between secular modernization, the identity crisis within Iranian society, and the emergence of the revolution as a response to the state's cultural delegitimization. Utilizing a literature review method with a historical-analytical approach, data were gathered from relevant primary and secondary sources and analyzed qualitatively through historical interpretation to trace the causal links between modernization, the marginalization of religious institutions, and revolutionary mobilization. The findings indicate that the top-down, Western-oriented secular modernization initiated by the regime created social dislocation and a profound identity crisis. The secularization of public institutions, the marginalization of the ulama (clergy), and the penetration of Western culture weakened the cultural legitimacy of the Pahlavi regime. In this context, Islam was rearticulated by scholars and intellectuals as an ideology of resistance, capable of mobilizing diverse social groups into a revolutionary movement. In conclusion, the 1979 Iranian Revolution was not merely a consequence of political and economic failure, but also the result of a conflict between the state's secular modernization project and the religio-cultural identity of the people. These findings emphasize that modernization processes insensitive to a society's identity structures have the potential to trigger state delegitimization and the resurgence of political Islam.

Keywords: Iran, 1979 Iranian Revolution, Secular Modernization, Identity Crisis, Pahlavi Dynasty.

Abstrak

Revolusi Iran 1979 berdiri sebagai tonggak sejarah dalam dunia Islam kontemporer yang dipicu bukan hanya oleh dinamika politik dan ekonomi, melainkan juga oleh krisis identitas akibat ambisi modernisasi sekuler Dinasti Pahlavi. Studi ini bermaksud mengeksplorasi keterkaitan antara kebijakan modernisasi yang bersifat sekuler, keresahan identitas bangsa Iran, serta meletusnya revolusi sebagai reaksi atas hilangnya legitimasi budaya pemerintah. Melalui metode studi literatur dengan pendekatan sejarah-analitis, data dari berbagai sumber primer dan sekunder diolah secara kualitatif untuk memetakan hubungan sebab-akibat antara marginalisasi agama dan gerakan massa. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa agenda modernisasi top-down yang berkiblat ke Barat memicu dislokasi sosial dan keretakan identitas yang masif. Kebijakan sekularisasi di ruang publik serta pengikisan peran ulama justru meruntuhkan fondasi kekuasaan rezim Pahlavi. Dalam situasi ini, nilai-nilai Islam dikonstruksi ulang oleh para intelektual dan pemuka agama sebagai ideologi perlawanan yang efektif menyatukan beragam elemen masyarakat dalam satu gerakan revolusi. Sebagai simpulan, peristiwa tahun 1979 merupakan manifestasi dari benturan antara visi modernitas sekuler negara dengan akar identitas religi-kultural rakyat, melampaui sekadar isu kegagalan ekonomi. Riset ini menegaskan bahwa proses modernisasi yang mengabaikan karakteristik identitas lokal cenderung mengakibatkan delegitimasi otoritas negara dan mendorong bangkitnya kekuatan politik berbasis Islam.

Kata Kunci: Iran, Revolusi 1979, Modernisasi Sekuler, Krisis Identitas. Dinasti Pahlavi

Copyright (c) 2026 Fatimah Hs, Muhammad Yunus, Muhammad Jusman Rivay Rumra, A. Nurfadhil,
Hasaruddin, Rahmawati

✉ Corresponding author: Fatimah Hs

Email Address: ftkuinam.imah@gmail.com (UIN Alauddin Makassar)

Received 01 April 2025, Accepted 10 April 2026, Published 25 April 2026

PENDAHULUAN

Peristiwa yang menandai tumbangnya monarki sekuler di bawah Dinasti Pahlavi serta berdirinya Republik Islam Iran yang dipimpin oleh otoritas keagamaan dianggap sebagai salah satu titik balik paling krusial dalam sejarah Islam kontemporer (Kamrava, 2013; Moin, 2009). Revolusi ini tidak

sekadar mentransformasi peta politik internal Iran, tetapi juga memperkenalkan model baru mengenai interaksi antara agama Islam dan kedaulatan negara di zaman modern. Lebih jauh lagi, fenomena ini membuktikan bahwa agenda modernisasi ekonomi dan politik yang berkiblat pada Barat tidak secara otomatis menciptakan masyarakat sekuler; sebaliknya, dalam situasi khusus, hal tersebut justru dapat memicu kemunculan politik Islam sebagai instrumen perlawanan terhadap visi modernitas yang dipaksakan oleh negara (Ahmad, 2020; Suryana, 2017; Kamrava, 2013).

Kasus Iran membuktikan bahwa modernisasi tidak selalu berarti sekularisasi. Alih-alih tersisih, Islam justru berevolusi menjadi kekuatan politik sebagai reaksi atas modernisasi paksa Dinasti Pahlavi. Hal ini mempertegas bahwa nilai-nilai religius mampu tampil sebagai alternatif ideologis yang tangguh dalam menghadapi struktur negara yang sekuler.

Di bawah kepemimpinan Mohammad Reza Shah dari Dinasti Pahlavi, Iran mengakselerasi agenda modernisasi melalui serangkaian kebijakan strategis, termasuk westernisasi, industrialisasi, pembaruan agraria, serta perombakan sistem hukum dan pendidikan yang bersifat sekuler (Moin, 2009). Puncak dari ambisi ini tercermin dalam *White Revolution* (Revolusi Putih) tahun 1963, sebuah inisiatif yang dirancang untuk mengadopsi model pembangunan Barat demi mengubah wajah Iran menjadi bangsa modern (Kamrava, 2013). Meskipun secara teoretis bertujuan untuk memacu kemajuan nasional dan menghubungkan Iran dengan sistem global kontemporer, praktik kebijakan ini justru dilakukan secara otoriter dan berpusat pada kekuasaan elite (*top-down*). Akibatnya, keterlibatan publik terabaikan dan lembaga-lembaga tradisional yang merupakan pilar kekuatan sosial masyarakat Iran kian terpinggirkan.

Hal ini merefleksikan paradoks modernisasi di Iran: di satu sisi, pemerintah berambisi memosisikan diri sebagai kekuatan progresif yang mengejar kemajuan melalui adopsi model pembangunan Barat. Namun, di sisi lain, metode yang diterapkan secara elitis dan otoriter justru memperlebar jurang pemisah antara negara dan rakyatnya. Ketegangan tersebut menjadi pemicu utama lahirnya perlawanan sosial. Hal ini terjadi karena proses modernisasi tidak dirasakan sebagai gerakan kolektif milik bangsa, melainkan dipandang sebagai instrumen kekuasaan yang menegasikan fondasi budaya serta struktur sosial yang telah lama tumbuh dalam masyarakat Iran.

Modernisasi sekuler yang diimplementasikan oleh Dinasti Pahlavi tidak membuahkan stabilitas politik maupun kohesi sosial, melainkan memicu keretakan sosial dan krisis identitas budaya yang signifikan. Perubahan struktur negara tersebut menciptakan jarak yang lebar antara kebijakan pemerintah dengan akar identitas religi serta budaya rakyat. Berbagai langkah seperti sekularisasi sistem hukum dan pendidikan, pembatasan pengaruh ulama, hingga masuknya nilai-nilai Barat secara masif dianggap sebagai serangan terhadap fondasi tradisi lokal dan nilai keislaman oleh sebagian besar Masyarakat. Akibatnya, perlawanan terhadap kekuasaan Shah tidak hanya berakar pada persoalan ekonomi atau politik saja, tetapi juga dipicu oleh persepsi kolektif bahwa agenda modernisasi tersebut telah menyebabkan hilangnya identitas budaya (*dekulturalisasi*) serta merusak legitimasi nilai-nilai Islam di Iran.

Fenomena ini menyingkap sisi kelam dari agenda modernisasi: ketika transformasi yang diinstruksikan oleh negara gagal beresonansi dengan nilai dan jati diri rakyat, ia justru berubah menjadi pemicu krisis alih-alih menjadi solusi pembangunan. Di Iran, modernisasi tidak hanya merombak tatanan sosial secara lahiriah, tetapi juga mengusik aspek yang paling mendasar, yaitu identitas kultural dan religius. Pada titik krusial inilah perlawanan mendapatkan momentum dan energinya. Resistensi yang muncul bukan semata-mata gerakan politik untuk menumbangkan kekuasaan, melainkan sebuah perjuangan eksistensial untuk memproteksi makna diri serta warisan nilai tradisional yang dirasa terancam oleh gelombang modernitas yang dianggap terlalu "asing" dan dipaksakan.

Walaupun literatur mengenai Revolusi Iran 1979 telah sangat melimpah, mayoritas kajian masih terpaku pada penjelasan dari sudut pandang politik, ekonomi, dan figur sentral revolusi. Faktor-faktor seperti kekuasaan otoriter Shah, kesenjangan sosial-ekonomi, serta kepemimpinan karismatik Ayatollah Khomeini sering kali menjadi fokus utama dalam analisis mobilisasi rakyat (Moin, 2009). Meski sudut pandang ini sangat krusial, dimensi mengenai krisis identitas kerap kali kurang mendapatkan tempat sebagai variabel analisis yang fundamental. Di Iran, gejala politik yang memicu revolusi sebenarnya berakar pada pertentangan mendalam terkait jati diri bangsa, keabsahan budaya, serta peran agama dalam kerangka modernitas. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini mengajukan argumen bahwa Revolusi Iran adalah konsekuensi dari krisis identitas akibat modernisasi sekuler, yang kemudian dikonversi menjadi energi revolusioner untuk menumbangkan tatanan politik yang mapan.

Upaya ini bertujuan untuk mengalihkan fokus analisis dari sekadar "gejala permukaan" menuju "akar permasalahan yang mendasari." Ketika mayoritas literatur membatasi diri pada fenomena kasatmata—seperti kemerosotan ekonomi, represi politik, atau karisma kepemimpinan—analisis ini justru menggali lebih dalam ke ranah identitas yang sering terabaikan namun bersifat deterministik. Dalam kerangka ini, Revolusi Iran dipandang bukan sekadar ledakan politik sesaat, melainkan manifestasi dari kegelisahan eksistensial masyarakat yang merasa jati dirinya terancam. Dari titik kegelisahan inilah, energi revolusioner menemukan momentum dan bentuknya yang paling nyata.

Berangkat dari problematika tersebut, artikel ini mengajukan argumen bahwa Revolusi Iran 1979 adalah konsekuensi sejarah dari ambisi modernisasi sekuler Dinasti Pahlavi yang diterapkan secara otoriter dan elitis (*top-down*). Proyek ini tidak hanya merombak tatanan sosial Iran, tetapi juga memicu krisis identitas keagamaan dan budaya yang kemudian dikonversi menjadi kekuatan revolusi berbasis Islam.

Dengan mengaplikasikan pendekatan historis-analitis melalui studi pustaka, artikel ini bertujuan membedah hubungan kausal antara modernisasi sekuler, krisis identitas rakyat, serta kemunculan revolusi sebagai reaksi atas hilangnya legitimasi budaya negara. Analisis ini membuktikan bahwa Revolusi Iran bukanlah reaksi tunggal terhadap ketimpangan ekonomi atau otoritarianisme, melainkan sebuah artikulasi dari benturan fundamental antara visi modernitas negara dan identitas keislaman masyarakat dalam peta sejarah dunia Islam kontemporer.

Analisis terhadap Revolusi Iran 1979 telah menjadi tema sentral dalam berbagai diskursus akademik, baik di tingkat global maupun di lingkungan akademis Indonesia. Dalam kancah internasional, penelitian-penelitian konvensional umumnya membedah revolusi melalui kacamata struktural. Fokus utamanya meliputi karakter otoriter rezim Shah, kesenjangan dalam pertumbuhan ekonomi, pergeseran kelas sosial, serta pengaruh kepemimpinan dalam menggerakkan massa, yang sering kali dikaitkan dengan teori konflik kelas dan revolusi sosial (Kamrava, 2013). Dalam perspektif ini, revolusi dipandang sebagai dampak langsung dari keretakan struktural di dalam tatanan negara modern.

Di sisi lain, publikasi akademik di Indonesia cenderung mengeksplorasi fenomena ini melalui sejarah politik Islam dan perubahan institusional setelah revolusi. Banyak peneliti memfokuskan perhatian pada interaksi antara agama dan kekuasaan, terutama terkait pengaruh ulama Syiah dan sentralitas figur Ayatollah Khomeini dalam mendirikan Republik Islam (Fadli, 2021; Hasan, 2019). Studi lainnya menyoroti peran Islam sebagai motor penggerak transformasi politik sekaligus fondasi bagi legitimasi negara yang baru (Ahmad, 2020; Suryana, 2017). Beberapa riset terkini juga mulai mendalami fenomena pascarevolusi, seperti kemunculan arus pasca-Islamisme dalam peta politik Iran kontemporer (Nugraha, 2018). Walau demikian, mayoritas kajian ini masih terpaku pada tahap meletusnya revolusi dan peran para aktornya, sehingga belum sepenuhnya menggali akar sosial-budaya yang lebih fundamental.

Secara umum, baik dalam diskursus internasional maupun nasional, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) dalam menempatkan agenda modernisasi sekuler Dinasti Pahlavi sebagai penyebab utama krisis identitas. Sering kali, modernisasi Pahlavi hanya diposisikan sebagai konteks ekonomi atau politik belaka, tanpa dilihat sebagai sebuah proyek transformasi budaya yang memicu delegitimasi rezim akibat benturan keras dengan identitas religius-kultural masyarakat setempat.

Melalui perspektif tersebut, penelitian ini menempatkan krisis identitas sebagai instrumen analisis fundamental untuk membedah akar sosiopolitik dan sejarah di balik Revolusi Iran 1979. Dengan pendekatan ini, fenomena revolusi tersebut tidak lagi dilihat secara sempit sebagai reaksi atas kebijakan otoriter atau kesenjangan ekonomi semata.

Sebaliknya, Revolusi Iran dipahami sebagai dampak tak terelakkan dari benturan mendalam antara agenda modernisasi sekuler yang dipaksakan oleh negara dengan fondasi identitas masyarakat Iran yang telah lama berakar pada nilai-nilai Islam serta tradisi lokal. Penelitian ini mempertegas bahwa gejolak besar tersebut merupakan muara dari perjuangan masyarakat dalam mempertahankan integritas kultural mereka yang terancam oleh transformasi negara yang bersifat asing.

METODE

Kajian ini menerapkan metode studi pustaka dengan pendekatan historis-analitis guna membedah dinamika Revolusi Iran 1979 dalam bingkai modernisasi Dinasti Pahlavi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada berbagai literatur primer dan

sekunder. Pemilihan sumber didasarkan pada kriteria otoritas akademik, kedekatan waktu dengan objek penelitian, serta keterkaitan tematik dengan variabel modernisasi, krisis identitas, dan gerakan revolusi. Data primer bersumber dari pemikiran ideologis para tokoh revolusioner Iran, sedangkan data sekunder mencakup literatur ilmiah, artikel jurnal terakreditasi, serta kajian akademik mengenai lanskap politik-sosial Iran kontemporer.

Analisis data dikelola secara kualitatif lewat teknik interpretasi historis. Fokus utama analisis ini adalah memetakan hubungan kausalitas serta kesinambungan sejarah antara agenda modernisasi sekuler, dislokasi sosial, hingga puncaknya pada mobilisasi massa. Melalui pendekatan tersebut, Revolusi Iran 1979 dapat dipahami sebagai muara dari proses kesejarahan yang kompleks dan multidimensi, melampaui sekadar fenomena politik yang terjadi secara tiba-tiba atau insidental.

HASIL DAN DISKUSI

Modernisasi Sekuler Dinasti Pahlavi

Agenda pembaruan Iran pada abad ke-20 mencapai puncaknya yang paling terstruktur selama periode kekuasaan Dinasti Pahlavi, yang diawali oleh Reza Shah Pahlavi pada 1925 dan dipercepat secara signifikan oleh penggantinya, Mohammad Reza Shah. Di bawah kepemimpinan dinasti ini, Iran mengalami transformasi besar yang berfokus pada pembangunan negara modern dan adopsi gaya hidup Barat (Kamrava, 2013). Visi modernisasi ini berorientasi pada pembentukan negara-bangsa yang kuat melalui sentralisasi politik, pengembangan sektor industri, penguatan birokrasi, serta perombakan menyeluruh pada institusi sosial dan budaya. Pembangunan nasional dipandang sebagai upaya untuk menyamai model negara Barat, di mana modernisasi tidak hanya mencakup aspek ekonomi, melainkan juga sebuah proyek penataan ulang identitas nasional. Dalam hal ini, prinsip sekularisme, efisiensi birokrasi, dan semangat nasionalisme diposisikan lebih tinggi dibandingkan otoritas keagamaan tradisional (Suryana, 2017).

Selama era Reza Shah, upaya pembaruan negara diaktualisasikan lewat pembentukan birokrasi pusat yang kokoh, modernisasi militer, serta perluasan infrastruktur yang dibarengi dengan pemangkasan peran lembaga keagamaan di ranah publik. Pemerintah memperkuat struktur birokrasi dan secara terencana membatasi pengaruh agama dalam urusan sosial-politik (Moin, 2009). Fungsi-fungsi sosial yang awalnya dikelola oleh para ulama—terutama di sektor pendidikan, hukum, dan administrasi—mulai diambil alih secara bertahap oleh negara. Dominasi madrasah tradisional mulai digantikan oleh perluasan sistem pendidikan sekuler, sementara pembaruan di bidang hukum secara efektif mengikis wewenang pengadilan agama. Lebih dari itu, kebijakan westernisasi di bidang kebudayaan membuktikan bahwa modernisasi Pahlavi tidak sekadar menasar lembaga formal, melainkan juga berupaya mengubah pola perilaku dan *habitus* sosial masyarakat secara menyeluruh (Ahmad, 2020).

Agenda pembaruan tersebut diteruskan dan semakin diperkuat di bawah kepemimpinan Mohammad Reza Shah, terutama melalui inisiasi *White Revolution* (Revolusi Putih) pada tahun 1963.

Akan tetapi, agenda modernisasi ini diterapkan melalui pendekatan *top-down* yang cenderung otoriter, sehingga mengakibatkan rapuhnya tatanan sosial tradisional dan terbatasnya ruang partisipasi publik. Kebijakan tersebut tidak sekadar merombak struktur pemerintahan, melainkan juga memicu dinamika sosial yang rumit di tengah komunitas Muslim Iran (Muhammad, 2012). Di era ini, cakupan modernisasi kian meluas yang mencakup program pembaruan agraria, akselerasi pendidikan, pengembangan industri, serta berbagai regulasi sosial lainnya (Kamrava, 2013). Secara resmi, *White Revolution* dianggap sebagai rencana pembangunan yang progresif demi memacu modernitas bangsa sekaligus mempertahankan stabilitas politik. Akan tetapi, di sisi lain, kebijakan ini justru memperkokoh dominasi negara dan mengikis tatanan sosial tradisional yang selama ini menjadi sandaran bagi masyarakat Iran (Fuady, 2016). Dengan demikian, modernisasi tidak sekadar berperan sebagai program pembangunan nasional, melainkan juga digunakan sebagai alat untuk memperkuat legitimasi dan konsolidasi kekuasaan pemerintah (Fadli, 2021; Hasan, 2019).

Dampak paling krusial dari agenda modernisasi Dinasti Pahlavi adalah terjadinya marginalisasi yang terencana terhadap lembaga-lembaga keagamaan serta elemen sosial tradisional. Kebijakan reformasi agraria secara efektif mengikis sumber pendapatan ekonomi institusi agama, sementara meluasnya sistem birokrasi dan pendidikan sekuler mulai mengambil alih peran ulama dalam menentukan nilai serta standar perilaku di masyarakat. Di sisi lain, hubungan erat antara pemerintah dan kekuatan Barat memperdalam anggapan bahwa pembaruan ini bukanlah upaya kemajuan nasional yang tumbuh dari akar budaya sendiri, melainkan sebuah agenda westernisasi yang memaksakan struktur sosial-politik asing ke dalam kehidupan bangsa Iran (Ahmad, 2020; Suryana, 2017).

Oleh karena itu, upaya modernisasi sekuler yang diusung oleh Dinasti Pahlavi tidak seharusnya dilihat hanya sebagai langkah pembangunan nasional biasa. Sebaliknya, hal ini merupakan sebuah proyek transformasi hegemonik yang berambisi merombak total tatanan politik, sosial, hingga budaya Iran agar selaras dengan paradigma modernitas Barat. Proses ini pada akhirnya memicu friksi yang tajam antara otoritas negara yang sekuler dengan basis masyarakat yang religius. Walaupun kebijakan tersebut berhasil memacu pertumbuhan ekonomi dan memperkokoh lembaga-lembaga negara, modernisasi ini juga menyisakan keretakan struktural yang mendasari munculnya krisis identitas serta runtuhnya legitimasi rezim Pahlavi. Segala dinamika tersebut menjadi faktor kunci yang mendorong meletusnya Revolusi Iran pada tahun 1979 (Suryana, 2017).

Krisis Identitas dan Delegitimasi Rezim

Meskipun agenda modernisasi sekuler Dinasti Pahlavi mampu meningkatkan kapasitas institusi negara dan mengakselerasi perubahan ekonomi, kebijakan tersebut secara simultan memicu keretakan identitas yang masif di tengah masyarakat. Ketegangan identitas ini terjadi karena modernisasi sekuler dianggap berbenturan keras dengan prinsip-prinsip Islam yang merupakan fondasi kehidupan sosial rakyat Iran.

Krisis tersebut berakar dari upaya agresif negara dalam mengadopsi model modernitas Barat, sementara di sisi lain, mayoritas penduduk tetap memegang teguh Islam, tradisi setempat, serta

kepemimpinan ulama sebagai pilar utama jati diri kolektif mereka. Oleh karena itu, bagi banyak kalangan di Iran, kebijakan Pahlavi tidak sekadar dipandang sebagai program kemajuan fisik, melainkan sebuah ancaman budaya yang membahayakan keberlanjutan identitas religi-kultural bangsa (Ahmad, 2020; Suryana, 2017).

Penyebab fundamental dari krisis identitas ini berakar pada peminggiran sistematis terhadap institusi ulama di dalam tatanan sosial-politik Iran. Sebelum periode Pahlavi, kaum ulama menduduki posisi krusial sebagai pemegang otoritas religius sekaligus tokoh sosial yang mendominasi sektor hukum dan pendidikan. Namun, agenda modernisasi sekuler secara perlahan menggerus pengaruh tersebut dengan mengalihkan fungsi-fungsi sosial ke tangan birokrasi negara modern, khususnya lewat sekularisasi sistem pengajaran dan perombakan tatanan hukum (Moin, 2009).

Pergerakan revolusi ini juga didorong oleh dinamika sosial serta budaya strategis yang khas dalam masyarakat Iran (Prabaswari, 2021), serta dipengaruhi secara signifikan oleh konjungtur politik di kawasan Timur Tengah yang tengah bergejolak (Abdulrachman, 2023). Dengan demikian, Revolusi Iran dapat dipahami sebagai produk dari interaksi yang saling berkelindan antara krisis identitas yang mendalam, pengaruh kepemimpinan ideologis yang kuat, serta kompleksitas dinamika sosial-politik baik di tingkat domestik maupun regional.

Terpinggirnya peran ulama ini pada gilirannya mengakibatkan merosotnya kewibawaan pemerintah di hadapan kelompok masyarakat religius. Dampaknya, proyek modernisasi yang dijalankan oleh rezim tidak lagi dipandang sebagai kemajuan, melainkan dianggap sebagai langkah terstruktur untuk melenyapkan pengaruh Islam dari ranah publik.

Di samping itu, masifnya pengaruh budaya Barat dalam keseharian masyarakat Iran semakin memperkuat anggapan bahwa rezim Pahlavi tengah melakukan proses dekulturalisasi. Upaya memopulerkan gaya hidup ala Barat, modifikasi aturan berpakaian, serta kecenderungan elite pemerintah terhadap nilai-nilai modernitas Barat mempertegas kesan bahwa modernisasi tidak hanya terbatas pada adopsi teknologi, tetapi juga merombak fondasi nilai kebudayaan secara fundamental (Ahmad, 2020). Fenomena ini pada akhirnya memperkokoh pandangan bahwa modernisasi adalah bentuk pengikisan budaya yang secara perlahan melenyapkan jati diri asli Iran-Islam (Fuady, 2016), yang menutup celah bagi keterlibatan politik dan menindas tegas kelompok oposisi. Minimnya saluran resmi untuk menyampaikan aspirasi atau kritik membuat rasa tidak puas terhadap agenda modernisasi bertumpuk menjadi perlawanan sosial serta penentangan berbasis moral-religius.

Dalam kondisi yang penuh tekanan ini, kecaman terhadap pemerintah tidak lagi sekadar menjadi gerakan politik melawan otoritarianisme, melainkan bertransformasi menjadi penolakan total terhadap keabsahan budaya dari proyek modernisasi itu sendiri (Fadli, 2021; Hasan, 2019). Pada akhirnya, kekuasaan Shah dianggap sebagai entitas politik yang sepenuhnya terasing dan kehilangan keterikatan dengan akar identitas asli masyarakat Iran.

Dalam kerangka ini, identitas Islam menemukan kembali urgensi politiknya sebagai landasan legitimasi tandingan terhadap otoritas negara sekuler. Di tengah situasi krisis identitas yang melanda,

Islam dikonstruksi ulang sebagai fondasi otoritas alternatif yang memiliki kekuatan untuk menguji dominasi tatanan negara modern (Mehran, 2003).

Ketegangan identitas yang lahir dari proyek modernisasi sekuler Pahlavi ini pada akhirnya menciptakan ruang sosial bagi Islam untuk bertransformasi menjadi bahasa politik perlawanan yang solid (Suryana, 2017). Maka, runtuhnya legitimasi rezim Shah bukan sekadar dipicu oleh persoalan finansial atau kegagalan politik, melainkan juga berakar dari pandangan bahwa pemerintah telah terputus dari nilai-nilai sejarah dan spiritualitas rakyatnya.

Oleh karena itu, krisis identitas di Iran pada periode pra-revolusi dapat diinterpretasikan sebagai produk dari konfrontasi antara agenda modernisasi negara yang berkiblat pada sekularisme Barat dengan fondasi jati diri masyarakat yang bersendikan Islam dan tradisi lokal. Friksi inilah yang pada akhirnya membangun landasan kultural, moral, serta emosional bagi eskalasi mobilisasi revolusioner, yang mencapai puncaknya pada Revolusi Iran 1979.

Krisis Identitas sebagai Basis Mobilisasi Revolusi

Keresahan identitas akibat modernisasi sekuler Dinasti Pahlavi memang tidak serta-merta memicu pemberontakan, namun ia membangun fondasi sosial-budaya yang kokoh bagi penggunaan Islam sebagai ideologi perlawanan (Aprida et al., 2023). Menjelang tahun 1979, krisis ini menjadi motor utama penggerak revolusi. Islam mengalami pergeseran peran, dari sekadar tuntunan spiritual menjadi instrumen politik kolektif yang sanggup mempersatukan faksi-faksi oposisi untuk menumbangkan kekuasaan Shah (Suryana, 2017). Dengan demikian, Revolusi Iran adalah sebuah upaya rakyat untuk merebut kembali jati diri kolektif dan otoritas budaya yang sebelumnya dikebiri oleh sistem negara sekuler.

Proses reartikulasi Islam sebagai senjata melawan dominasi negara dan pengaruh Barat sangat dipengaruhi oleh peran ulama serta kaum intelektual. Ruhollah Khomeini menjadi sosok kunci yang mengubah wajah Islam menjadi ideologi perlawanan yang sangat efisien terhadap rezim Pahlavi (Moin, 2009). Di mata Khomeini, rezim tersebut bukan hanya otoriter, tetapi telah mengkhianati kedaulatan bangsa serta prinsip-prinsip Islam (Hasan, 2019; Ahmad, 2020). Lewat perpaduan narasi keagamaan dan kritik politik yang tajam, ia berhasil mengubah arus oposisi menjadi gerakan moral-religius dengan dukungan luas (Fadli, 2021).

Selain Khomeini, pemikir seperti Ali Shariati juga memberikan kontribusi besar dengan membingkai Islam sebagai teologi pembebasan sosial (Kamrava, 2013). Islam tidak lagi dipandang secara ritualistik-pasif, melainkan sebagai ideologi emansipatoris untuk melawan penindasan modern. Narasi ini sangat menarik minat kalangan mahasiswa, intelektual muda, dan kelas menengah di perkotaan (Suryana, 2017).

Ketegangan identitas yang menumpuk sejak era 60-an hingga 70-an akhirnya bersinggungan dengan krisis ekonomi dan represi politik, yang kemudian meledak menjadi mobilisasi massa besar-besaran pada 1978–1979. Dinamika ini juga dipengaruhi oleh pergeseran pemikiran dalam lanskap politik Iran, termasuk munculnya bibit pasca-Islamisme (Nugraha, 2018). Meskipun kelompok yang

terlibat sangat beragam—mulai dari pedagang tradisional (bazaar), mahasiswa, hingga kaum miskin kota—Islam berperan sebagai simbol pemersatu yang mampu menyediakan bahasa politik tunggal bagi koalisi yang heterogen tersebut (Ahmad, 2020).

Kemenangan Revolusi Iran 1979 membuktikan bahwa keberlangsungan kekuasaan di Iran tidak dapat dipisahkan dari aspek identitas religi-kultural rakyatnya. Keabsahan politik di sana sangat bergantung pada sejauh mana negara mampu merangkul nilai-nilai agama sebagai basis penerimaan publik (Ghiasvand et al., 2024). Kejatuhan Dinasti Pahlavi terjadi karena agenda modernisasi sekulernya secara perlahan menghancurkan fondasi legitimasi budaya pemerintah (Zulkifli et al., 2025). Ketika negara tidak lagi mencerminkan identitas rakyatnya, proyek modernisasi yang awalnya ditujukan untuk memperkuat negara justru berbalik menjadi katalis yang mempercepat keruntuhan rezim tersebut.

Kesimpulannya, Revolusi Iran 1979 dapat dimaknai sebagai titik kulminasi dari krisis identitas yang dihasilkan oleh proyek modernisasi sekuler Dinasti Pahlavi, yang kemudian dikonversi menjadi gerakan masif melalui artikulasi Islam sebagai ideologi perlawanan politik. Peristiwa ini tidaklah terbatas pada pergantian kepemimpinan semata, melainkan merupakan sebuah penolakan mendasar terhadap model modernitas negara yang dianggap tidak selaras dengan jati diri religio-kultural masyarakat Iran.

KESIMPULAN

Revolusi Iran 1979 bukanlah sekadar produk sampingan dari otoritarianisme politik atau kesenjangan ekonomi di bawah kekuasaan Dinasti Pahlavi. Sebaliknya, peristiwa besar ini merupakan titik puncak dari krisis identitas yang dipicu oleh agenda modernisasi sekuler negara yang diterapkan secara elitis (*top-down*), bersifat memaksa, dan sepenuhnya berkiblat pada model Barat. Walaupun modernisasi tersebut efektif dalam memperkuat birokrasi dan memacu pertumbuhan ekonomi, ia secara simultan menciptakan jurang pemisah yang lebar antara otoritas negara dan fondasi identitas religio-kultural masyarakat Iran.

Melalui kebijakan sekularisasi lembaga publik, pengebirian peran ulama, serta infiltrasi budaya Barat yang masif, rezim Pahlavi secara bertahap menghancurkan legitimasi budayanya sendiri. Dalam ruang hampa legitimasi inilah, Islam bertransformasi dari sekadar keyakinan spiritual menjadi kerangka ideologis dan simbol perlawanan terhadap negara. Upaya para ulama dan intelektual Muslim dalam merumuskan kembali Islam sebagai ideologi politik memungkinkan krisis identitas tersebut dikonversi menjadi gerakan revolusioner yang pada akhirnya menumbangkan kekuasaan Shah.

Temuan ini mempertegas bahwa akar Revolusi Iran bersemayam dalam ketegangan struktural antara proyek kemajuan sekuler negara dan jati diri historis bangsa. Dalam konstelasi sejarah dunia Islam kontemporer, penelitian ini memberikan peringatan penting bahwa modernisasi yang dipaksakan tanpa mempertimbangkan sensitivitas identitas religio-kultural masyarakat sangat berisiko memicu

delegitimasi negara. Hal ini pada gilirannya akan menjadi katalis bagi kebangkitan politik Islam sebagai bentuk pertahanan diri dan resistensi terhadap dominasi modernitas sekuler yang dianggap asing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Baik orang maupun lembaga yang berkontribusi dalam proses penulisan artikel dapat disebutkan di sini.

REFERENSI

- Abdulrachman, O. (2023). Revolusi Iran di tengah pergolakan Timur Tengah. *Analisis CSIS*, 5, 426–439.
- Ahmad, A. (2020). Dimensi Islam dan politik: Telaah historis atas Revolusi Iran 1979. *Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Islam*, 14(2), 145–160.
- Argenti, G. (2018). Kelompok post Islamisme pasca Revolusi Islam Iran 1979. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 139–152. <https://doi.org/10.35706/jpi.v3i1.1418>
- Fadli, M. (2021). Revolusi Iran 1979 dan berdirinya Republik Islam Iran: Peran ulama Syiah dalam transformasi politik, sosial, dan budaya. *Jurnal Transformasi Politik dan Masyarakat*, 7(1), 33–48.
- Handayani, S. P., Ailsa, W., & Faiq, A. (2025). Sejarah perkembangan sistem politik Iran dari Dinasti Qajar hingga Revolusi Islam 1979. *Center of Middle Eastern Studies*, 15(2), 1–13. <https://doi.org/10.20961/cmec.15.2.58232>
- Hasan, R. (2019). Peran Ayatullah Khomeini dalam Revolusi Islam di Iran 1979. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 7(2), 89–103.
- Ichsan, S. M., & Hidayatullah, S. (2023). Revolusi Republik Islam Iran: Studi atas bentuk pembaharuan Ayatollah Ruhollah Khomeini. *Jurnal Ekshis*, 1(1). <https://doi.org/10.59548/je.v1i1.17>
- Kamrava, M. (2013). *The modern Middle East: A political history since the First World War* (2nd ed.). University of California Press.
- Moin, B. (2009). *Khomeini: Life of the Ayatollah*. I.B. Tauris.
- Muhammad, M. (2012). Dinamika masyarakat Muslim dalam sejarah: Kajian gerakan Revolusi Islam di Iran. *Jurnal Salam*, 15(1).
- Nugraha, T. (2018). Kelompok post-Islamisme pasca Revolusi Islam Iran 1979. *Politikom Indonesiana*, 3(2), 201–214.
- Prabaswari, R. (2021). Pengaruh budaya strategis pada kepemimpinan dan Revolusi Islam Iran. *Jurnal ICMES: The Journal of Middle East Studies*, 5(2), 186–208. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v5i2.107>